UN dan paradoks akademik (Abd. Haris)

Kasus Ujian Nasional (UN) 2009 ini betul-betul memalukan dan memilukan. Bagaimana tidak, para siswa yang sudah serius belajar mempersiapkan diri menghadapi UN demi kelulusan, ternyata dinyatakan tidak lulus secara kolektif oleh BSNP dengan indikasi kecurangan dalam bentuk jawaban yang sama. Usaha para siswa tersebut ke-mudian menjadi sia-sia dan mereka jelas malu dan pilu hatinya serta menuntut dan dituntut untuk dilakukan UN ulangan.

UN ulang yang dilakukan secara serentak pada 10 Juni 2009, bagaimanapun tetap menyisakan rasa malu dan pilu bagi dunia pendidikan di negeri ini. Mengingat dilakukannya UN ulangan tersebut karena adanya kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif untuk beberapa sekolah di berbagai propinsi di Indonesia, antara lain wilayah Sumatera, Kendari, Ngawi, Madiun, dan Cimahi.

Selama ini UN dijadikan parameter dan penentu kelulusan siswa, sehingga para siswa dan guru sibuk menghalalkan segala cara agar siswa-siswanya lulus melalui UN. Hal ini ternyata justru menjadi pemicu berbagai bentuk kecurangan dan berimplikasi pada ketidakjujuran dalam dunia pendidikan. Padahal kejujuran merupakan hal yang utama dari pendidikan.

Oleh karena itu, mestinya UN bukan menjadi penentu kelulusan siswa tetapi cukup hanya menjadi parameter mutu sekolah. Kelulusan siswa tetap harus ditentukan oleh evaluasi sekolah melalui koordinasi dinas pendidikan di daerah kabupaten/kota. Apalagi negeri ini sudah mempunyai sistem otonomi pendidikan sampai tingkat yang paling dasar. Sampai kita menggunakan jenis penerapan KTSP dalam kurikulum setiap pelajaran.

Jika sistem evaluasi akhir untuk menentukan kelulusan siswa itu dilakukan oleh pusat/nasional, itu justru paradoks (bertentangan) dengan sistem otonomi pendidikan. Padahal sistem otonomi pendidikan diatur dalam undang-undang sementara UN hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah, tetapi ironisnya UN dengan payung hukum PP dapat mengalahkan sistem otonomi pendidikan dengan payung hukum undang-undang (UU No 23 Tahun 2003).

Dengan sistem otonomi pendidikan dan penerapan KTSP di setiap sekolah, sebenarnya cukup yang menentukan kelulusan siswa ⬆dalah guru masing-masing, sebab mereka yang mengetahui riil kemampuan siswa di sekolahnya. Untuk mengontrol agar guru benar-benar melakukan evaluasi secara profesional, maka kontrol tetap harus dilakukan oleh dinas-dinas pendidikan di daerah masing-masing.

Bentuk kontrol, ketika evaluasi akhir kelulusan siswa dilakukan oleh guru masing-masing, juga harus dilakukan oleh mitra-mitra yang independen, dan sanksi tegas harus diberikan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran. Untuk soal ujiannya, dapat dikoordinir oleh dinas-dinas pendidikan setempat dengan tetap mempertimbangkan asas potensi kemampuan masing-masing sekolah di daerah bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi evaluasi kelulusan siswa lebih pas jika dilakukan oleh guru di sekolah melalui koordinasi dinas pendidikan setempat. Kalaupun UN tetap dipaksakan untuk dilakukan, karena kepentingan proyek yang didanai APBN, dan sejenisnya, maka UN janganlah menjadi penentu kelulusan siswa, tetapi cukup hanya menjadi standar kualitas sekolah. Kalau UN menjadi ukuran kelulusan, maka berbagai modus kecurangan akan tetap terjadi.

UN dan moralitas

Diakui atau tidak, dalam setiap tahunnya selalu terjadi kecurangan dalam pelaksanaan UN. Inisiataor terutama dari pihak sekolah. Akan tetapi kecurangan-kecurangan yang terjadi tidak semasif UN tahun 2009 ini. Jadi dimungkinkan inisiator kecurangan pada tahun ini berasal dari instansi yang lebih tinggi di atas sekolah. Meski hal itu dilakukan oleh oknum yang ada pada instansi yang dimaksud, namun ini cermin perilaku amoral (yang tidak bermoral).

Moralitas yang semestinya dijunjung tinggi dan difasilitasi oleh media pendidikan ternyata rusak gara-gara UN. Setinggi apapun bentuk evaluasi, jika terjadi kecurangan dalam prosesnya, maka bentuk evaluasi tersebut menjadi Sangat hina dan menghinakan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, meskipun pihak-pihak tersebut tidak ikut melakukan hal yang hina.

Dunia pendidikan ⬆dalah dunia yang mulia karena tidak hanya mencetak intelektualitas, tetapi juga mencetak moralitas. Output pendidikan tidak hanya berorientasi pada sebuah pekerjaan tetapi juga pada kepribadian yang jujur. Kalau dalam prosesnya, para siswa sudah diajari ketidakjujuran, maka itu sama dengan mencetak output pendidikan yang tidak jujur, jelasnya tidak bermoral.

Pendidikan harus dapat mencetak kualitas sumber daya manusia (SDM) yang seutuhnya. Tidak hanya harus membuat siswa pintar, tetapi siswa itu harus berakhlak baik. Artinya, sisi moralitas siswa harus juga dikedepankan. Evaluasi yang namanya UN itu hanya menjadi media evaluasi kognitif dan sama sekali tidak mengevaluasi ranah afektif dan psikomotorik. Jadi moralitas juga nelum tercover di dalamnya. UN justru menjadi ajang perilaku amoral.

Oleh karena itu harus ada koreksi bersama dari hati nurani yang paling dalam soal evaluasi kelulusan dalam bentuk UN. Pelaksanaan UN selalu menimbulkan persoalan berulang setiap tahun. Maka ide terbaik ⬆dalah mengembalikannya kepada Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Ujian ini jauh lebih adil dan proporsional karena guru lah yang mengetahui kemampuan siswa.n

Ref:
Duta Masyarakat Online, Friday, 12 June 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id